

KARYA ILMIAH

**KEBIJAKAN *COMPREHENSIVE SCHOOL SAFETY* SEBAGAI SOLUSI
MEREDUKSI KORBAN BENCANA ALAM di SMA NEGERI 96 JAKARTA**



DISUSUN OLEH :

1. RIAN ARIF PRATAMA (0065456540)

**SMA NEGERI 96 JAKARTA
JL. JATI RAYA NO.40, RT.7/RW.12, KAPUK, KECAMATAN CENKARENG,
KOTA JAKARTA BARAT**

11730

HALAMAN PENGESAHAN

KARYA ILMIAH

KEBIJAKAN *COMPREHENSIVE SCHOOL SAFETY* SEBAGAI SOLUSI MEREDUKSI KORBAN BENCANA ALAM di SMA NEGERI 96 JAKARTA

Karya ini diajukan untuk melengkapi penugasan dalam keikut serta lomba cipta karya ilmiah
FESTIVAL KESIAPSIAGAAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA 2023

Jakarta, 27 September 2023

Pembimbing

Penulis

NURROHMAH MASRUROH, S.Pd
NIKKI. 1026766

RIAN ARIF PRATAMA
NIS. 0065456540

Mengetahui,
Kepala Sekolah

SUKARMAN, M. Pd
NIP.196908191998021002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa saya ucapkan kepada tuhan YME atas ridho dan rahmat-Nya sehingga saya selaku penulis dapat menyajikan hasil karya tulis ilmiah ini kepada para pembaca sekalian yang mengangkat topik terkait ‘Inovasi dan Tindakan Preventif untuk melindungi masa depan’. Penulisan ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata lomba karya ilmiah FESTIVAL KESIAPSIAGAAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA 2023 dengan tajuk *COMPREHENSIVE SCHOOL SAFETY (CSS)* sebagai solusi mereduksi korban bencana alam.

Penulis mengucapkan terima kasih juga apresiasi tinggi kepada pihak - pihak terlibat yang telah membantu dan mendukung karya ini dengan penuh antusiasme, segala bentuk bantuan dan dukungan pada saat penyusunan karya ilmiah ini dilaksanakan, saya harap mampu terbayarkan penuh dengan selesainya karya ini, juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada guru guru kami yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan karya ini.

Tulisan ini dibuat untuk menyajikan hasil analisis objektif terhadap referensi yang valid, antara lain tentang Inovasi Baru, Tindakan Preventif, Permasalahan Ekologi, Manfaat Penerapan Siaga Bencana, dan Pengaruh Penerapan Tindakan Preventif sebagai wujud serta pengintegrasian satuan pendidikan siaga bencana serta penanggulangan permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita.

Terima Kasih saya ucapkan kepada semua pengulas, yang juga penulis menyadari bahwa masih adanya banyak kekurangan dan kesalahan dalam karya tulis berikut. Oleh karenanya penulis memohon maaf atas berbagai keliru dan kesalahan yang ada. Kritik dan saran senantiasa saya terima sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait karya untuk meningkatkan kualitas tulisan saya sendiri untuk kedepannya.

Jakarta, 27 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat.....	4
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pengertian <i>Comprehensive School Safety</i>	6
2.2 Tiga Pilar <i>Comprehensive School Safety</i>	6
BAB III METODE PENULISAN.....	9
3.1. Metode Penulisan.....	9
3.2. Tipologi Penelitian.....	9
3.3. Sumber Data	9
3.4. Alat Pengumpulan Data	9
3.5. Metode Analisis Data.....	10
3.6. Bentuk Hasil Penelitian.....	10
BAB IV PEMBAHASAN	11
4.1. Problem Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Bencana di Indonesia	11
4.1.1. Profil Sekolah	11
4.1.2. Evaluasi terhadap Implementasi Sekolah Siaga Bencana di SMAN 96 Jakarta	11
4.2. Konsep ideal Penguatan Kebijakan <i>Comprehensive School Safety</i> di Indonesia	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	16
5.1. Kesimpulan.....	16
5.2. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

LAMPIRAN 20
LAMPIRAN 1 20
LAMPIRAN 2 21
LAMPIRAN 3 22

ABSTRAK

Minimnya sekolah yang siap sedia dalam menghadapi bencana sangatlah menggambarkan bagaimana tertinggalnya program penanganan kebencanaan di Indonesia, hal ini disebabkan dari bagaimana program pengenalan terhadap bencana masih saja dilakukan hanya ala kadarnya ataupun secara normatifnya, sehingga di sini Kebijakan *Comprehensive School Safety* (CSS) hadir menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan kesiapsiagaan di sekolah, sebab sekolah adalah lingkungan primer kita semua, disini kebijakan CSS berfokus pada tiga pilar utama yakni fasilitas sekolah yang aman, manajemen pengendalian bencana, dan pelatihan sumber daya manusia seperti guru. Dengan kebijakan CSS memiliki tujuan besar untuk membangun sekolah yang benar-benar siaga bencana secara berkelanjutan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa dan guru agar mampu fokus mencetak penerus yang gemilang. Namun data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan tingkat kerusakan yang besar atas fasilitas pendidikan disebabkan bencana alam. Untuk mengatasi tantangan ini perlunya Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dikembangkan, SSB bertujuan membentuk budaya waspada di sekolah, meningkatkan keselamatan dan ketahanan terhadap bencana. Implementasi SSB melibatkan empat aspek utama yakni dengan sikap dan tindakan seluruh warga sekolah, kebijakan dan aturan sekolah, rencana kesiapsiagaan bencana, serta alokasi sumber daya kebencanaan. Penguatan infrastruktur sekolah menjadi esensial.

Kata Kunci : Kebijakan Komprehensif, Sekolah Siaga Bencana

ABSTRACT

The lack of schools that are ready to face disasters really illustrates the lagging behind in disaster programs in Indonesia. This is due to how disaster prevention programs are carried out only in a rudimentary or normative manner. Here, the Comprehensive School Safety (CSS) Policy offers a comprehensive approach to overcoming preparedness problems in schools because schools are the primary environment for all of us. Here, CSS focuses on three main pillars, namely safe school facilities, disaster control management, and training of human resources such as teachers. The CSS program has the big goal of building schools that are truly disaster-prepared. With ongoing and ongoing physical and psychological impacts, schools should be a safe place for students and teachers to be able to focus on producing brilliant successors. However, data from the National Disaster Management Agency (BNPB) shows the level of damage that has impacted educational facilities due to disasters. To overcome this challenge, the School Disaster Preparedness (SSB) Program was developed. SSB aims to create a culture of alertness in schools, increasing safety and resilience to disasters. Implementation of SSB involves four main aspects, namely the attitudes and actions of all school members, school policies and rules, disaster preparedness plans, and allocation of disaster resources. Strengthening school infrastructure is essential.

Keywords: *Comprehensive Policy, Disaster Preparedness Schools*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah, seringkali hanya menekankan pada aspek sosialisasi prosedur siaga bencana, bukan efektifitas implementasinya. Akibatnya, banyak korban berjatuh baik di level pendidik, siswa, dan manajemen sekolah, ketika bencana alam menimpa sekolah tersebut. Kebijakan *Comprehensive School Safety* (CSS), akan efektif mampu membangun sekolah siaga bencana dan mereduksi korban bencana sekecil mungkin. Ada tiga pilar yang menjadi pondasi dari kebijakan CSS, yaitu adanya fasilitas Gedung sekolah yang aman bencana, adanya manajemen pengendalian bencana di sekolah, sistem reduksi korban bencana alam dan pelatihan sdm siaga bencana di sekolah.

Guru dan siswa di sekolah seringkali menjadi korban saat terjadi bencana alam. Data terakhir dari *United Nation International Strategy For Disaster*, menyatakan bahwa 60 persen anak-anak sekolah di dunia merupakan korban bencana alam. Bahkan diprediksi pada 10-20 tahun mendatang dampak bencana akan mempengaruhi fisik serta psikologi anak.¹ Sekolah sebagai institusi formal seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa dan guru. Faktanya, siswa dan guru yang *notabene* menghabiskan banyak waktunya di sekolah selama kurang lebih 8 jam sehari banyak menjadi korban bencana alam. Data dari BNPB hingga 2017 menyebutkan kerusakan terjadi pada 48.363 rumah dan 2.323 fasilitas umum. Kuantitas kerusakan fisik terbanyak terjadi pada kerusakan fasilitas pendidikan. Lebih lanjut, Amri dalam studinya menjelaskan dalam 15 tahun terakhir sebanyak 46.648 sekolah terdampak bencana skala menengah dan besar.² Jumlah korban peserta didik yang banyak dari bencana merupakan resiko kehilangan generasi penerus suatu bangsa, dan itu adalah resiko besar secara jangka panjang suatu negara. Banyaknya jumlah korban bencana di Indonesia disebabkan karena minimnya pengetahuan mitigasi bencana pada masyarakat Indonesia khususnya pelaku dalam dunia pendidikan.³

Banyaknya korban jiwa terjadi pada kalangan anak usia sekolah, baik di sekolah di sekolah, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengetahuan bencana dan pengurangan risiko bencana telah diberikan awal atau sejak dini.⁴ Program SSB (Sekolah Siaga Bencana) ini bertujuan untuk membentuk budaya waspada dan keselamatan di sekolah dan meningkatkan

¹ Nisfi Anisah, dan Sri Sumarni. "Model sekolah aman bencana dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter di MIN 1 Bantul." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* Vol. 10 No. 1 (2019), hlm. 10.

² Dewangajati, Aditya, and Sartika Djamaluddin. "Pengaruh Lembaga Pendidikan dan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Partisipasi Pelatihan Bencana Rumah Tangga." *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)* Vol 5 No. 1 (2020), hlm. 30.

³ Hayudiyas, B. Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik. *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 94-102.

⁴ Lihat juga: Rahesli Humsona, Sri Yuliani, dan Sigit Pranawa. Kesiapsiagaan Anak Dalam Menghadapi Bencana: Studi Di Kabupaten Sleman. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (LWSA)*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 1-8.

ketahanan mereka terhadap bencana oleh warga sekolah.⁵ Untuk membentuk Program Sekolah Siaga Bencana (SSB), ada empat hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah 1) sikap dan tindakan dari seluruh warga sekolah 2) kebijakan dan aturan sekolah 3) rencana kesiapsiagaan bencana pada sekolah 4) sumber daya kebencanaan pada sekolah.⁶ Bangunan sekolah yang kurang layak, rusaknya sarana prasarana sekolah dan rendahnya dan infrastruktur sekolah yang minim akan menimbulkan ancaman bencana dari keselamatan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.⁷ Implementasi sekolah siaga bencana terdiri tiga aspek utama yang harus ada didalam sekolah tersebut diantaranya adalah fasilitas sekolah yang aman, sekolah penanggulangan bencana dan pendidikan pengurangan dan pencegahan risiko bencana.⁸ Sekolah Siaga Bencana (SSB) merupakan sistem pencegahan bencana di sekolah-sekolah melalui peningkatan kesadaran semua elemen sekolah, baik budaya sekolah, infrastruktur sekolah dan penduduk sekolah baik secara individu dan kolektif pada waktu dan setelah bencana terjadi.⁹

Menyadari bahaya laten dari risiko bencana di institusi sekolah, Pemerintah berkepentingan membangun kesadaran dan budaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah. Pemerintah kemudian menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Nasional No.70a/MPN/SE/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia dinyatakan bahwa: (1) *Penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilakukan di sekolah melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah; (2) Pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap bencana di sekolah melalui: (a) pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah; (b) pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler; (c) pembangunan kemitraan dari jaringan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah.*¹⁰ Secara hukum, masyarakat yang berpotensi terkena resiko bencana alam, memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan bencana. Masyarakat juga mendapat perlindungan sosial dan rasa aman serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulan bencana yang menimpanya. Hak masyarakat tersebut diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.¹¹

⁵ Qoriandani, M., dan Pambudi, D. I., Implementasi Sekolah Siaga Bencana Pada SD Unggulan Aisyiyah Bantul. Elementary School: *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 247-253.

⁶ Dewi, A. R., Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana Tingkat Sekolah Dasar Di Yogyakarta [Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat]. Universitas Negeri Semarang, (2019).

⁷ Nisfi Anisah, dan Sri Sumarni. "Model sekolah aman bencana....", hlm. 9-20.

⁸ *Ibid.*

⁹ Utama, R. I., Syah, N., Rifwan, F., Sari, N. M., dan Yandra, M., Penerapan Dan Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana Bagi Anak-Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Agam. *CIVED*, Vol. 5 No. 4 (2018).

¹⁰ https://gerashiaga.files.wordpress.com/2012/06/surat-edaran-mendiknas-no-70a_mpn_se_2010.pdf, diakses 27 September 2023.

¹¹ Indonesia, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Sekolah pencegahan bencana yang didirikan di lingkungan sekolah memiliki pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana untuk mencapai pencegahan bencana dan keselamatan dan menyebabkan hilangnya anak-anak usia sekolah.¹² Program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) merupakan program yang telah dituang pada Permen Kemdikbud No. 33 Tahun 2019. Program ini berfungsi untuk bahwa untuk memberikan perlindungan dari peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari risiko bencana baik itu dari segi fisik dan psikologis serta menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang berdampak bencana sehingga dalam hal ini program kesiapsiagaan bencana pada Program SPAB mungkin bisa dimasukkan pada kurikulum sekoah yang berfungsi untuk mengurangi resiko bencana pada sekolah.¹³

Sekolah Pencegahan Bencana merupakan program berbasis masyarakat yang bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di Indonesia.¹⁴ Belajar dari sejarah dan pengalaman dari berbagai peristiwa bencana baik itu yang diakibatkan oleh alam dan manusia di Indonesia, maka urgensi pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan dari bencana dimulai pada tingkat pendidikan usia dini, dasar dan menengah dalam membangun dan membentuk budaya keselamatan dan ketahanan resiko bencana, khususnya bagi anak-anak usia dini dan generasi muda.¹⁵ Pendidikan kesiapsiagaan bencana dimulai dari usia yang sangat muda.¹⁶ Dengan kata lain, prediksi bencana, mitigasi dan respon yang efektif dan manajemen bencana pada populasi rentan adalah mungkin.¹⁷ Ketahanan sekolah sangat ditentukan oleh kontribusi guru dan siswa serta masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi guru dan siswa menjadi penting dalam membangun ketahanan sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan bencana.¹⁸

Faktanya, berbagai persoalan muncul ketika konsep sekolah siaga bencana diimplementasikan. Misalnya, kurangnya ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai, dan prasarana yang tidak menunjang kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebab kesiapsiagaan sendiri adalah sebuah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk guna menanggulangi dan menangani bencana melalui pengorganisasian dan melalui langkah yang tepat dan berdaya guna, namun selama ini isu mengenai penanggulangan dan kesiapsiagaan hanya sampai dengan ekstrakurikuler palang merah remaja, dalam hal ini terdapat miskonsepsi bahwasannya

¹² Wihyanti, R., Analisis Inovasi Pendidikan Kebencanaan di Sekolah di Indonesia. *Wijayakusuma Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 16-21.

¹³ Kasman, R., Bimbingan Satuan Pendidikan Aman Bencana Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Pasca Bencana Di Kota Palu, Sigii Dan Donggala. *Jurnal Obor Penmas*, Vol. 2 No. 1. (2019), hlm. 67-77.

¹⁴ Angraini, L. M., Syamsuddin, S., Wirawan, R., Qomariyah, N., dan Sukrisna, B., Pendampingan Sekolah Siaga Bencana Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Di SMK Kehutanan Qomarul Huda Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol. 1No. 2 (2019), hlm. 58-64.

¹⁵ Daud, R., Sari, S. A., Milfayetty, S., dan Dirhamsyah, M., Penerapan Pelatihan Siaga Bencana Dalam Siaga Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Komunitas SMA Negeri 5 Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*, Vol. 1 No. 1 (2014), hlm. 26-34.

¹⁶ Al-Nashr, M. S., Integrasi Pendidikan Siaga Bencana Dalam Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, Vol. 6 No. 2 (2018), hlm. 82-101.

¹⁷ Shah, A. A., Gong, Z., Pal, I., Sun, R., Ullah, W., & Wani, G. F., Disaster Risk Management Insight on School Emergency Preparedness – a Case Study of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Vol. 51 (2020).

¹⁸ Dwiningrum, S. I. A., Developing School Resilience for Disaster Mitigation: A Confirmatory Factor Analysis. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, Vol. 26 No. 4 (2017), hlm. 437-451.

ekstrakurikuler yang bersifat sebagai wadah untuk pengembangan diri, keterampilan, dan mencetak prestasi¹⁹, belum secara efektif mampu membangun budaya kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan sekolah.

Ketidakefektifan implementasi sekolah siaga bencana, seharusnya menjadi evaluasi secara menyeluruh atas implementasi kebijakan sekolah siaga bencana, untuk kemudian bisa diajukan kebijakan baru tentang sekolah siaga bencana yaitu Kebijakan *Comprehensive School Safety* (CSS). Kebijakan CSS merupakan penanggulangan bencana yang terintegrasi langsung dibawah manajemen sekolah, sehingga bisa langsung memberikan arahan, wawasan, pelatihan, serta bantuan fasilitas, peralatan, ataupun bantuan pendanaan dalam implementasi sekolah siaga bencana. Kebijakan CSS ini akan membentuk komunitas masyarakat sekolah yang langsung fokus terhadap permasalahan bencana dan efektif dalam menangani tanggap bencana secara terstruktur dan integral. Berdasar isu masalah implementasi sekolah siaga bencana yang masih belum sesuai harapan secara teoritis dan cenderung normatif, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “kebijakan *comprehensive school safety* sebagai solusi mereduksi korban bencana alam di sekolah.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi penerapan kebijakan sekolah siaga bencana di SMA Negeri 96 Jakarta?
2. Bagaimanakah konsep ideal kebijakan *comprehensive school safety* sebagai solusi mereduksi korban bencana alam di sekolah?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Utama dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan mengetahui bagaimana sistem kesiapsiagaan bencana yang baik dan komperhensif dalam pengintegrasiasannya di intuisi pendidikan untuk mengetahui langkah preventif dan kebijakan kebijakan yang perlu diterapkan dalam melindungi masa depan yang inovatif dan solutif menangani daripada penanggulangan bencana sampai dengan mitigasi bencana.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mampu menjelaskan bagaimana penerapan sekolah siaga bencana di SMA Negeri 96 Jakarta dalam mewujudkan sekolah aman bencana,
2. Menjelaskan gambaran konsep ideal Kebijakan *Comprehensive School Safety* sebagai solusi mereduksi korban bencana alam di sekolah

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis dan juga yang berhubungan dengan kesiapsiagaan pada dunia kependidikan, serta mampu menjadi bahan

¹⁹ Riadi Muchlisin “Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis Ekstrakurikuler” <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis-ekstrakurikuler.html>

referensi dari pengembangan penelitian berikutnya sehingga menambahkan bahan kepustakaan bagi ilmu kesehatan masyarakat, dan juga ayo siaga bencana (ASB), serta mampu menjadi sebuah inovasi baru dalam penanganan kesiapsiagaan bencana. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis dalam pengembangan konsep sekolah siaga bencana, khususnya untuk meningkatkan kesadaran bencana yang mungkin terjadi kapanpun waktunya, dan juga penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah landasan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai Kebijakan *Comprehensive School Safety* yang terintegrasi dalam institusi pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi serta masukan bagi sekolah maupun pihak - pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan kelembagaan mengenai kesiapsiagaan bencana pada sekolah dasar guna mengurangi risiko yang terjadi di dalam sekolah dan juga diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan inovasi dan solusi baru mereduksi potensi dan dampak bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian *Comprehensive School Safety*

Rebekah Paci-Green, dkk dalam studinya menjelaskan *Comprehensive School Safety* (CSS) adalah suatu upaya yang sistematis dalam membangun sekolah yang aman dari bencana, yang didasarkan tiga pilar yaitu fasilitas Pendidikan yang aman, sistem manajemen sekolah siaga bencana, dan reduksi resiko bencana.²⁰ Tujuan dari CSS adalah untuk melahirkan sekolah yang mampu melindungi siswa dan pengajar dari resiko kematian, cedera fisik dan berhentinya kelangsungan kegiatan Pendidikan dari berbagai bencana yang tidak terprediksi.²¹

Menurut studi yang dilakukan Rebekah Paci-Green, dkk, Sebagian besar negara di dunia sudah melakukan integrasi kebijakan penanggulangan bencana dalam sektor Pendidikan, namun kedalaman integrasi tersebut masih sangat terbatas. hanya 43% negara di dunia yang menyatakan secara tertulis dalam kebijakan publiknya untuk menyampaikan integrasi Pendidikan dan kebijakan penanggulangan bencana. Bahkan, ada negara yang hanya menyebutkan kebijakan tersebut dalam satu paragraph dan ada yang satu kalimat. Misalnya, negara-negara di afrika yang memiliki tingkat tertinggi dalam mencantumkan kebijakan integrasi siaga bencana dan sekolah lebih dari satu paragraf.²²

2.2 Tiga Pilar *Comprehensive School Safety*

Rebekah Paci-Green dkk, dalam studinya menjelaskan ada tiga pilar dari kebijakan *Comprehensive School Safety* (CSS). *Pilar Pertama*, fasilitas Gedung sekolah yang aman dari resiko kematian, cedera dan kerugian ekonomis yang diakibatkan dari kerusakan Gedung sekolah disebabkan bencana alam. Kerusakan Gedung sekolah baik bersifat struktur bangunan dan non struktur bangunan, dapat dihindari jika dilakukan Pembangunan yang mempertimbangkan segala aspek Pembangunan secara komprehensif yaitu mulai desain Gedung, konstruksi dan pemeliharaan Gedung sekolah. Pilar pertama, bisa diidentifikasi dengan melihat aspek Gedung yang terkait (1) pemilihan lokasi Pembangunan Gedung yang aman atau sebaliknya, (2) pengawasan dalam proses Pembangunan Gedung yang ketat berdasar desain gambar gedung yang sudah ditentukan, (3) lancarnya pendanaan untuk Pembangunan Gedung sekolah tersebut, (4) kebijakan untuk membatasi penggunaan sekolah sebagai tempat penampungan korban, ketika terjadi bencana.

Pilar kedua, adanya sistem penanggulangan bencana sekolah yang efektif meminimalisir dan mengurangi resiko bencana yang terjadi. Pilar kedua bisa diidentifikasi dalam tiga aspek yaitu (1) adanya perencanaan pengurangan resiko dan penanggulangan bencana, (2) adanya

²⁰ Rebekah Paci-Green, Vigneaux, G., Jensen, S., dan Petal, M. Developing and Implementing Comprehensive School Safety Policy, (2018). Lihat juga: Rebekah, Paci-Green, et al. "Comprehensive school safety policy: A global baseline survey." *International journal of disaster risk reduction* Vol. 44 (2020), hlm. 1.

²¹ GADRRRES, & UNISDR. (2017b). Comprehensive school safety: A global framework in support of the global alliance for disaster risk reduction and resilience in the education sector. Global Alliance for Disaster Risk Reduction in the Education Sector (GADRRRES) and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR).

²² Rebekah Paci-Green, Vigneaux, G., Jensen, S., dan Petal, M. Developing, hlm. 7.

pelatihan tentang meredakan bencana alam yang dialami, (3) adanya pelatihan sikap dan manajemen tanggap bencana kepada pengajar dan siswa. manajemen bencana yang kuat mulai dari tingkat kementerian Pendidikan hingga turun pada tingkat sekolah, akan menghasilkan penerapan SSC yang tanggap bencana dan memastikan bahwa semua siswa, staf manajemen sekolah serta guru bisa menghadapi bencana alam sewaktu-waktu. Respon yang tepat terhadap bencana menjadi pijakan dasar dalam sistem SSC. Kurangnya respon siswa sekolah terhadap partisipasi aktif dalam rencana pengurangan resiko bencana di sekolah, karena kemungkinan

besar disebabkan oleh paradigma bahwa siswa adalah korban pasif dari bencana alam di sekolah, sehingga tidak memiliki peran dalam membangun kesiapsiagaan bencana di sekolah.²³

Pilar ketiga, adanya pelatihan manajemen resiko bencana dan sistem ketahanan bencana di Lembaga Pendidikan. Ada tiga indikator atas pilar ketiga yaitu (1) integrasi pengetahuan tentang *Comprehensive School Safety* (CSS) dalam kurikulum pendidikan sekolah, (2) adanya pelatihan tentang tanggap bencana kepada guru dan siswa, (3) adanya kampanye dan sosialisasi secara masif tentang perlunya kesadaran tanggap bencana bagi setiap anggota masyarakat sekolah.²⁴ Pendidikan pengurangan resiko bencana dan sistem ketahanan sekolah akan meningkatkan wawasan dan ketrampilan siswa dan guru dalam melakukan pengurangan resiko bencana di sekolah. Integrasi pengetahuan tanggap bencana dalam kurikulum sekolah, meliputi penyediaan modul belajar pengurangan resiko bencana, ketahanan sekolah dan perubahan iklim. Di Indonesia, dilaksanakan dengan membuat konsep kurikulum percontohan sekolah siaga bencana yang sudah terintegrasi dengan kurikulum Pendidikan nasional dan daerah. Kementerian Pendidikan di Indonesia dengan dukungan dari PBB dan beberapa Lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan di sekolah, mengembangkan proyek standarisasi sekolah siaga bencana di semua tingkan Pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA/SMK.²⁵ Uji coba kurikulum siaga bencana dilakukan selama delapan bulan di sembilan sekolah baik di level SD, SMP dan SMA/SMK Negeri. Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Pendidikan untuk seluruh dinas Pendidikan di daerah yang mendukung pengembangan dan implementasi kurikulum sekolah siaga bencana.²⁶

Uji coba kurikulum dikombinasikan dengan kepemimpinan yang kuat di dalam pemerintahan, agar tidak mendapat kritik dari berbagai LSM Pendidikan dan lingkungan, bahwa proyek sekolah siaga bencana bersifat formalitas belaka, tanpa menghasilkan dampak yang signifikan dalam menyiapkan sekolah tanggap bencana. Secara global, ada Sebagian besar sudah melakukan penerapan integrasi kurikulum sekolah dengan pengetahuan resiko bencana, perubahan iklim dan ketahanan sekolah terhadap bencana. Sebaliknya, di level guru, hampir Sebagian besar negara masih belum memasukkan pelatihan tanggap bencana kepada

²³ Fernandez, G., dan Shaw, R., Youth participation in disaster risk reduction through science clubs in the Philippines. *Disasters*, Vol. 39 No. 2 (2015), hlm. 279–294.

²⁴ Rebekah Paci-Green, Vigneaux, G., Jensen, S., dan Petal, M. *Developing...*, hlm. 9-13.

²⁵ Sardjunani, N., *Advancing Child Rights in the Context of DRR Initiatives in Indonesia, Indonesia Country's Experiences and Achievements*. Presented at the Ministry of Natural Development Planning. Ministry of Natural Development Planning (2010). lihat:https://www.unicef.org/eapro/Child_Right_DRR_Indonesia-2010.pdf+%&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us, diakses 27 september 2023

²⁶ Amri, A., Bird, D. K., Ronan, K., Haynes, K., dan Towers, B. Disaster risk reduction education in Indonesia: challenges and recommendations for scaling up. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, Vol. 17 No. 4 (2017), hlm. 595–612

para pengajar di sekolah. Tidak ada program pelatihan nasional guru tanggap bencana, kebanyakan pelatihan guru tanggap bencana hanya bersifat ad-hoc atau insidental.²⁷

Sosialisasi tentang pentingnya kesadaran masyarakat sekolah akan tanggap bencana, menjadi strategi alternatif untuk menyebarkan informasi tentang pengurangan resiko bencana dan ketahanan sekolah di luar institusi Pendidikan. Sosialisasi melalui pamflet, poster, iklan di televisi, media sosial dan seni bisa menjadi alternatif penyebaran informasi kesadaran tanggap bencana. Misalnya, di Maladewa yang mempublikasikan tanggap bencana nasional dengan bekerjasama antara badan nasional penanggulangan bencana Maladewa dengan komisi penyiaran. Kampanye yang dipublikasikan adalah tentang pesan kepada public akan bahaya dari bencana alam jika benar-benar terjadi.²⁸ Contoh lain misalnya di Fiji dimana BNPB Fiji bekerjasama dengan LSM lingkungan untuk mengembangkan kampanye yang menyampaikan pesan tentang nilai penting mengembangkan standar operasional prosedur dalam menyikapi keadaan darurat keselamatan karena terjadinya bencana di sekolah. Kampanye tersebut kemudian di siarkan secara nasional di televisi untuk dapat ditonton dan dipraktikkan oleh semua siswa dan pengajar disekolah.²⁹

²⁷ Rebekah Paci-Green, Vigneaux, G., Jensen, S., dan Petal, M. Developing..., hlm. 13.

²⁸ Maldives National Disaster Management Centre, Maldives national progress report on the implementation of the Hyogo Framework for Action (2011-2013). *Maldives National Disaster Management Centre* (2012). lihat: <https://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/reports/v.php?id=28967&pid:223>, diakses 27 septemeber 2023.

²⁹ IFRC & Save the Children. Public awareness and public education for disaster risk reduction: action-oriented key messages for households and schools, edisi kedua, (2018). lihat: <https://gadrres.net/resources/public-awareness-and-public-education-for-disaster-risk-reductionkey-messages>, diakses 27 september 2023

BAB III

METODE PENULISAN

3.1. Metode Penulisan

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka metode penulisan yang diterapkan, lazimnya menggunakan kaidah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Ada dua alasan pemilihan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian. *Pertama*, penulis mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data tentang kondisi sekolah-sekolah di DKI Jakarta yang sudah menerapkan sekolah siaga bencana. Kedua, penulis sebagai siswa SMA Negeri 96 Jakarta, sehingga data yang bisa didapatkan secara riil adalah kondisi sekolah penulis. Penulis akan menggunakan bentuk penelitian *deskriptif-evaluatif* dalam melakukan penelitian ini. Untuk lebih detailnya akan penulis sampaikan di bawah ini:

3.2. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah *deskriptif-evaluatif* artinya penulis melakukan analisis secara deskriptif atas implementasi kebijakan sekolah siaga bencana di SMA Negeri 96 Jakarta, kemudian dilakukan analisis berdasar teori *Comprehensive School Safety* (CSS) relasinya mereduksi resiko bencana alam di sekolah. Ada dua poin yang akan di deskripsikan yaitu (1) mendeskripsikan tentang penerapan sekolah siaga bencana di SMA Negeri 96 Jakarta, (2) mendeskripsikan konsep *Comprehensive School Safety* (CSS) sebagai alternatif solusi mereduksi korban bencana alam di SMA Negeri 96 Jakarta.

3.3. Sumber Data

Sumber data dan referensi utama tentang penelitian ini ada dua jurnal ilmiah yaitu jurnal ilmiah karya Rebekah, Paci-Green, dkk berjudul "Comprehensive school safety policy: A global baseline survey." *International journal of disaster risk reduction* Vol. 44 terbitan tahun 2020, dan jurnal karya Nisfi Anisah, dan Sri Sumarni berjudul "Model sekolah aman bencana dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter di MIN 1 Bantul." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* Vol. 10 No. 1 diterbitkan pada tahun 2019. Untuk sumber data sekunder diambil dari berbagai artikel atau jurnal ilmiah diantaranya (1) Dewanggajati, Aditya, and Sartika Djamaluddin. "Pengaruh Lembaga Pendidikan dan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Partisipasi Pelatihan Bencana Rumah Tangga." *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)* Vol 5 No. 1 terbitan tahun 2020, (2) Shah, A. A., Gong, Z., Pal, I., Sun, R., Ullah, W., & Wani, G. F., Disaster Risk Management Insight on School Emergency Preparedness – a Case Study of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Vol. 51. Terbitan tahun 2020.

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penulis gunakan adalah Jurnal JStor link, website buku internasional gratis situs Lib. Gen.com, dan jurnal level nasional dan internasional lewat web, elsevier, google.scholar.com. serta penulis juga ambil dari media online kemendikbud Republik Indonesia.

3.5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, adalah melakukan analisis data berdasarkan kebenaran dan kemampuan penalaran penulis terhadap data yang di sajikan disesuaikan dengan kerangka teori dan konsep yang digunakan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Ada dua langkah yang dipilih yaitu pengumpulan data secara deskriptif dan melakukan analisis dengan teori *Comprehensive School Safety* (CSS). Hasil documenter dan deskripsi permasalahan, dan landasan teori, akan di lanjutkan dengan melakukan proses analisis secara *deskriptif-evaluatif*. Terakhir akan disampaikan konsep ideal tentang *Comprehensive School Safety* (CSS) disekolah.

3.6. Bentuk Hasil Penelitian

Hasil penelitian ada dua yaitu, *pertama*, analisis *deskriptif-evaluatif* tentang implementasi sekolah siaga bencana di SMA Negeri 96 Jakarta. Kekurangan dan kelebihan dari penerapannya akan disampaikan dalam bab IV. Kedua, disampaikan gambaran konsep ideal kebijakan *Comprehensive School Safety* (CSS) jika diterapkan di sekolah untuk mengurangi resiko korban bencana alam yang terjadi di sekolah baik di siswa, staf dan guru disekolah yang terdampak bencana.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Problem Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Bencana di Indonesia

4.1.1 Profil Sekolah

SMA Negeri 96 Jakarta memiliki konsep gaya bangunan *Green Building NET Zero* yang memiliki struktur bangunan yang dirancang seakan terapung keatas untuk mencegah datangnya aliran air saat musim penghujan, sebab memiliki stuktur tanah yang lebih rendah 20 cm dari pemukiman, dan juga bangunan ini di desain tahan bencana dengan pembuatan area resapan air sebanyak mungkin, salah satunya dengan memindahkan lapangan basket ke lantai atas, sehingga area hijau bertambah dan juga unntuk menyikapi kemungkinan terjadinya banjir, maka konsep bangunan dirancang menyerupai bangunan panggung. Oleh karena itu, material paving block dipilih untuk lantai dasar agar dapat membantu penyerapan air hujan yang lebih maksimal.³⁰

4.1.2 Evaluasi terhadap Implementasi Sekolah Siaga Bencana di SMAN 96 Jakarta

Meski pembangunan gedung SMA Negeri 96 Jakarta sudah menerapkan konsep *Green Building Net Zero*, jika ditinjau dari teori kebijakan *Comprehensive School Safety (CSS)*, ada beberapa evaluasi yang bisa dideskripsikan. *Pertama*, belum adanya data yang utuh dan dipublikasikan terkait mitigasi risiko bencana alam dan dampaknya terhadap gedung sekolah dan warga sekolah (siswa dan guru). Hal ini tentu menyulitkan bagi siswa dan guru dalam mengantisipasi diri dalam aktivitas sehari-hari dalam kegiatan Pendidikan di SMA Negeri 96 Jakarta. Di web site resmi sekolah juga tidak disajikan data terkait mitigasi potensi bencana alam dan resiko bencana jika terjadi di sekolah tersebut. *Kedua*, alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan sekolah siaga bencana tidak menjadi fokus anggaran Pendidikan di sekolah. Minimnya anggaran untuk penegakan kebijakan sekolah terkait siaga bencana, bisa terlihat dari program sekolah bencana belum berjalan secara optimal, dan tidak terlalu familiar di siswa dan guru. Pamflet-pamflet, spanduk, petunjuk bencana tidak terlihat di banyak sudut gedung SMA Negeri 96 Jakarta. Hal ini akan menjadi kesulitan bagi pihak pemangku kebijakan di sekolah, jika anggaran dari dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kota sangat minim dan tidak menjadi fokus kebijakan *stakeholder* Pendidikan yang menangani masalah sekolah siaga bencana tersebut.

Ketiga, sistem koordinasi antara dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan sudin Jakarta barat dan sekolah perlu di lihat sebagai satu kesatuan kordinasi yang tidak terpisahkan. Konsep sekolah siaga bencana di SMA Negeri 96, terlihat belum memiliki daya dukung kordinasi yang baik, cenderung instruksional menunggu arahan dari tingkat pemegang kebijakan Pendidikan menengah baik di nasional, provinsi, maupun kota. Hal ini

³⁰ Angela Siallagan. "Pemprov DKI Renovasi SMAN 96 Jakarta Berkonsep Net Zero"
Pemprov DKI Renovasi SMAN 96 Jakarta Berkonsep Net Zero, Telan Rp 37 Miliar Halaman all -
Kompas.com, diakses 28 september 2023.

mengakibatkan manajemen sekolah tidak bisa berbuat banyak dalam mengakselerasi program siaga bencana di SMA Negeri 96 Jakarta.

Keempat, Bangunan SMA Negeri 96 Jakarta yang memiliki konsep menanggulangi bencana nyatanya malah berstruktur yang tidak tahan terhadap guncangan, Berdasarkan liputan dari sindonews.com strukturnya ada yang salah juga berkenaan dengan kabar bahwa bangunan sekolah ini berdiri di atas saluran air sehingga fondasinya labil, dan menjadi penyebab bangunan setengah jadi berlantai empat tersebut pernah rubuh juga lantaran konstruksi bangunan yang lemah³¹, juga dalam struktur bangunannya SMA Negeri 96 Jakarta memiliki struktur tangga yang sempit dan kecil, dan tanpa adanya pengarah dan instuksi pastinya akan sulit untuk melakukan evakuasi bilamana terjadi bencana.

Kelima, perlunya pembatasan dan perencanaan sekolah sebagai pusat evakuasi sementara. Pada konteks sekolah yang belum mengintegrasikan antara konsep siaga bencana dalam sistem pendidikannya, maka akan menjadikan sekolah sebagai tempat penampungan dan evakuasi siswa dan guru ketika terjadi bencana alam. konsep seperti ini, juga terlihat berlaku di SMA Negeri 96 Jakarta, dimana pusat-pusat evakuasi dan titik kumpul di dirikan, dengan harapan bisa menampung siswa dan guru, jika terjadi bencana alam. hal ini tentu tepat dalam satu sisi, tapi tidak tepat dalam sisi yang lain. Akibatnya, ketika terjadi bencana, proses Pendidikan akan cenderung tidak berjalan, dan banyak siswa yang diliburkan atau dievakuasi untuk terhindar dari bencana alam. seharusnya, ada pemisahan antara aktivitas Pendidikan yang berkelanjutan dengan proses penanganan korban bencana alam di sekolah.

Keenam, Melakukan intensifikasi dalam pelatihan tanggap bencana. Pelatihan tanggap bencana masih sangat minim di simulasikan di SMA Negeri 96 Jakarta. Yang sering dilakukan adalah proses evakuasi jika terjadi gempa dan kebakaran. Sedangkan untuk pelatihan yang sifatnya komprehensif mulai dari pencegahan, tanggap saat bencana, hingga penanganan korban pasca bencana belum menjadi perhatian dalam pelatihan tanggap bencana di sekolah. Kedepan perlu diadakan pelatihan instruktur tanggap bencana yang mampu memberikan training kepada semua warga sekolah agar terbentuk ketrampilan tanggap bencana mulai dari pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Ketujuh, Memperkuat kurikulum nasional dan pelatihan guru. Kurikulum Merdeka yang menjamin kebebasan siswa dalam belajar di sekolah sesuai minat dan bakatnya, perlu diimbangi dengan integrasi pengetahuan sekolah siaga bencana yang dimasukkan dalam kurikulum dan wajib di ajarkan kepada siswa dan guru. Guru sebagai pengajar disekolah, wajib diberikan bahan dan pelatihan konsep sekolah siaga bencana oleh dinas Pendidikan tingkat nasional, provinsi dan kota, agar mampu mengajarkan kepada murid-muridnya ketrampilan dan pengetahuan sekolah siaga bencana. Tidak adanya mata Pelajaran yang berfokus pada siaga bencana menjadi indikasi tidak adanya pelatihan siaga bencana di tingkat guru dan siswa. pelatihan tentang siaga bencana, justru dimasukkan dalam program

³¹ Sjukri. "Kesalahan Konstruksi Diduga Jadi Penyebab Robohnya Bangunan" Kesalahan Konstruksi Diduga Jadi Penyebab Robohnya Bangunan SMAN 96 Jakarta Barat (sindonews.com), diakses 28 september 2023

kerja ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR), yang *notabene* lembaga yang hanya sifatnya pengembangan minat dan bakat siswa, bukan Lembaga sekelas satgas siaga bencana seperti BNPB.

4.2 Konsep ideal Penguatan Kebijakan *Comprehensive School Safety* di Indonesia

Upaya untuk mewujudkan sekolah yang aman terhadap bencana, perlu kebijakan yang terkoordinasi dan sistematis, baik secara internal kementerian lingkungan hidup dan kementerian Pendidikan nasional, maupun secara eksternal dari mitra *non-government organization*. Kebijakan harus dikembangkan, didanai, dan dilaksanakan melalui upaya komprehensif, multi-lembaga, dan interdisipliner yang memperkuat koordinasi dan kerja sama dari skala lokal hingga nasional. Rekomendasi berikut ini dimaksudkan untuk menjadi *roadmap* para pejabat sekolah, mitra LSM, dan Lembaga advokasi masyarakat sipil dalam mencapai tujuan dari kebijakan CSS yaitu untuk melindungi siswa dan guru, menjamin kelangsungan pelaksanaan Pendidikan di sekolah, melindungi investasi sektor Pendidikan, dan meningkatkan pengurangan risiko dan pendidikan ketahanan. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk penguatan kebijakan *Comprehensive School Safety* di Indonesia, menurut studi RebekahPaci-Green dkk yaitu:

Pertama, Mengumpulkan dan menggunakan data mitigasi risiko bencana alam dan dampaknya. Data mitigasi yang valid, akan menjadi pijakan yang kuat dalam pengembangan kebijakan CSS di Indonesia. Data studi Rebekah, Paci-Green, dkk, menunjukkan bahwa dua pertiga dari negara-negara di dunia, mengalami kekeliruan dalam pengumpulan data mitigasi bencana, yang mempengaruhi pengembangan kebijakan sekolah tanggap bencana di negaranya. Namun, data survei juga menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga negara tersebut tidak secara sistematis mengumpulkan, memperbarui, atau membagikan data risiko sektor pendidikan kepada publik. Untuk memajukan CSS, pemerintah harus mengumpulkan dan mempublikasikan data non-sensitif mengenai kerugian bencana alam di sektor pendidikan.³²

Data penting mitigasi bencana mencakup jumlah kematian dan cedera (diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, kemampuan, dan usia), infrastruktur, dan hasil pendidikan jangka panjang. Mitra LSM dan organisasi advokasi lingkungan dapat memberikan dukungan teoritis dengan membantu mengembangkan indikator sektor pendidikan dan kerangka pemantauan di dalam negara dan lintas wilayah. Demikian pula, kementerian lingkungan hidup di Indonesia, dapat memulai atau terus bermitra dengan lembaga-lembaga lingkungan hidup yang ada untuk mengumpulkan data mitigasi bencana, risiko, dan prakiraan terjadinya bencana. Mereka dapat memastikan bahwa data tersebut dimasukkan ke dalam perencanaan sektor pendidikan dan disajikan kepada para pembuat kebijakan utama untuk memungkinkan pengembangan kebijakan CSS berbasis data valid mitigasi bencana di Indonesia. *Kedua*, Tetapkan titik fokus program siaga bencana di sekolah. Program penguatan kesadaran akan bahaya bencana di sekolah, perlu untuk terus diadvokasikan ke warga sekolah. Data studi Rebekah, Paci-Green, dkk, menunjukkan sekitar setengah dari negara-negara di dunia menunjukkan bahwa upaya advokasi berkelanjutan dari kementerian Pendidikan nasional, pejabat manajemen pengelolaan bencana, dan/atau LSM masyarakat sipil sudah memfasilitasi

³² Rebekah Paci-Green, Vigneaux, G., Jensen, S., dan Petal, M. Developing, hlm. 20.

pengembangan kebijakan CSS. Lebih lanjut, kehadiran advokasi merupakan indikator penting terhadap kebijakan indikator Pilar 3 kebijakan CSS. Namun, hanya sekitar setengah dari negara-negara di dunia yang melakukan tanggap bencana, membentuk sdm khusus untuk mengawasi pengurangan risiko bencana atau pendidikan dalam keadaan darurat. Sebagian besar negara tidak mengalokasikan dana untuk program tanggap bencana di sekolah-sekolahnya. Salah satu strategi untuk memastikan dan mempertahankan advokasi tanggap bencana di sekolah-sekolah adalah dengan membentuk kebijakan yang berfokus mengurangi resiko bencana dan membentuk sekolah aman bencana oleh kementerian lingkungan hidup dan kementerian Pendidikan nasional baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi intensif dalam melakukan advokasi kebijakan CSS dan memfasilitasi koordinasi di antara para pemangku kepentingan menjadi bagian mendasar dari kebijakan penting dalam membangun kesadaran tanggap bencana dan mengurangi resiko bencana di sekolah-sekolah. Jika fokus kebijakan sudah dilakukan, pemerintah harus bisa memastikan bahwa mereka mempunyai waktu dan sumber daya yang cukup untuk menangani menjalankan kebijakan CSS di sekolah-sekolah secara baik dan benar.

Ketiga, Membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi nasional dan daerah. Strategi lain untuk penegakan kebijakan CSS yang kuat dan berkelanjutan adalah pembentukan mekanisme koordinasi nasional. Mekanisme koordinasi tersebut dapat memberikan landasan untuk mengembangkan visi bersama sekolah siaga bencana, menetapkan prioritas dan menerapkan kebijakan dan inisiatif terkait keselamatan sekolah dan pendidikan dalam keadaan darurat. Dalam beberapa konteks, semua jenjang Pendidikan di Indonesia mungkin sudah tersedia beberapa fasilitas siaga bencana, namun dalam keadaan selanjutnya mengalami kekurangan. Sehingga perlu dibentuk satgas sekolah siaga bencana, yang bermitra dengan LSM lingkungan dalam pembangunan sekolah siaga bencana. Di tingkat daerah, mekanisme koordinasi, dengan titik fokus yang terhubung dengan kegiatan nasional, dapat memastikan bahwa rencana dan kebijakan di tingkat nasional dapat diterapkan secara efektif hingga level sekolah.

Keempat, melakukan penilaian atas ketersediaan fasilitas konsep sekolah siaga bencana secara nasional dan mengganti fasilitas yang tidak berfungsi atau tidak ada sebagai persyaratan sekolah tanggap bencana. Dalam kebijakan CSS terkait Pilar pertama, permasalahan lemahnya fasilitas sekolah menjadi kuncinya. Sementara lebih dari separuh negara yang merespons telah memasukkan bahasa dalam penilaian risiko sektor pendidikan. Data studi Rebekah, Paci- Green, dkk, menunjukkan kebijakan manajemen bencana di banyak negara, hanya 31% yang mendanai penilaian risiko bahaya pada bangunan sekolah mereka. Bahkan lebih sedikit lagi, yaitu 19%, yang mendanai renovasi sekolah-sekolah yang lemah tanggap bencananya. Proses identifikasi dan renovasi terhadap gedung sekolah-sekolah yang tidak aman, merupakan pilar penting implementasi kebijakan CSS, karena hal ini dapat menyelamatkan nyawa anak-anak, remaja, dan pendidik. Pemerintah yang memastikan keamanan gedung sekolah juga dapat melindungi investasi infrastruktur sektor pendidikan dan menjamin kehidupan masyarakat yang lebih cepat pemulihannya.

Oleh karena itu, pendanaan untuk pembangunan dan renovasi sekolah-sekolah yang rentan resiko bencana, merupakan sektor yang penting untuk investasi pemerintah.

Mitra pemerintah dalam pembangunan sekolah siaga bencana, harus mendukung upaya ini karena biaya yang dikeluarkan dan kapasitas teknis yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung sekolah aman bencana, seringkali sangat besar.³³

Kelima, perlunya pembatasan dan perencanaan sekolah sebagai pusat evakuasi sementara. Data studi Rebekah, Paci-Green, dkk, menunjukkan bahwa hanya 37% negara secara global, yang melakukan tanggap darurat telah mengembangkan pembatasan dalam penggunaan sekolah sebagai pusat evakuasi selama keadaan darurat. Pemanfaatan sekolah seharusnya tidak terbatas pada soal sekolah sebagai pusat evakuasi korban bencana, yang berakibat mempengaruhi kelangsungan proses bejalannya kegiatan pendidikan, kualitas pendidikan, dan keselamatan siswa serta guru. Oleh karena itu, perlunya adanya kebijakan dari kementerian Pendidikan agar tidak menjadikan sekolah sebagai pusat evakuasi korban bencana, dan merubahnya menjadi kebijakan sekolah yang ramah terhadap proses belajar-mengajar tanpa ada kekhawatiran sekolah beralih fungsi menjadi tempat evakuasi dan penampungan korban bencana.

Keenam, Melakukan intensifikasi dalam pelatihan tanggap bencana. Pelatihan merupakan komponen utama dalam membangun kompetensi siswa dan guru dalam membangun kesadaran akan tanggap bencana. Warga sekolah perlu untuk bisa menerapkan kesadaran yang terus-menerus akan bahaya bencana alam, termasuk bagaimana membangun respon yang tepat jika terjadi bencana serta bentuk perlindungan yang harus dilakukan. Data studi Rebekah, Paci-Green, dkk, menunjukkan hanya 46% negara secara global, yang mewajibkan sekolah untuk melakukan latihan kebakaran secara berkala; hanya 29% yang memberikan panduan tentang cara melakukan latihan kebakaran. Hanya 25% yang mencakup prinsip-prinsip manajemen bencana dalam pelatihan guru. Untuk mengisi kesenjangan ini, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mewajibkan pelatihan bencana kebakaran di sekolah dan bahaya bencana alam di sekolah secara berkala. Selain itu, dengan dukungan dari LSM lingkungan dan organisasi advokasi sipil, pemerintah akan mampu memberikan pelatihan siaga bencana kepada guru dan staf pengajar sehingga mereka dapat mengembangkan latihan dan simulasi secara efektif untuk siswanya.³⁴

Ketujuh, Memperkuat kurikulum nasional dan pelatihan guru. Data studi Rebekah, Paci-Green, dkk, menunjukkan bahwa 65% negara secara global, menunjukkan bahwa mereka telah memasukkan konsep sekolah siaga bencana, dan ketahanan sekolah, serta perubahan iklim ke dalam kurikulum nasional, namun, banyak juga dari negara-negara tersebut yang belum memasukkan konsep sekolah siaga bencana secara komprehensif dalam mata pelajaran tersebut ke dalam kurikulum Pendidikan nasional. Selain itu, hanya 35% negara di dunia yang memasukkan topik-topik sekolah siaga bencana ke dalam kurikulum pelatihan guru, artinya guru mengajarkan mata pelajaran tersebut tanpa persiapan akademis tentang konsep siaga bencana. Oleh karena itu, pemerintah harus memasukkan konsep sekolah siaga bencana ke dalam kurikulum nasional dan mencocokkannya dengan pelatihan guru siaga bencana dan sehingga pengembangan sekolah siaga bencana bisa berjalan secara profesional.³⁵

³³ Rebekah Paci-Green, Vigneaux, G., Jensen, S., dan Petal, M. Developing, hlm. 22

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan bab IV, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Pengembangan sekolah siaga bencana di SMA Negeri 96 Jakarta, dalam praktiknya sudah menjalankan konsep gedung yang aman terhadap bencana alam. Konsep *Green Building NET Zero* yang memiliki struktur bangunan yang dirancang seakan terapung keatas untuk mencegah datangnya aliran air saat musim penghujan. Implikasinya, maka bencana banjir akan bisa direduksi secara maksimal, sehingga siswa dan guru tidak beresiko terkena dampak negatif dari banjir yang sering kali melanda di wilayah DKI Jakarta.
- b. Meski demikian, dalam masih banyak aspek yang belum dipenuhi dalam membentuk konsep sekolah siaga bencana berdasar pada kebijakan *Comprehensive School Safety* di SMAN 96 Jakarta. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut. *Pertama*, belum adanya data yang utuh dan dipublikasikan terkait mitigasi risiko bencana alam dan dampaknya terhadap gedung sekolah dan warga sekolah (siswa dan guru). *Kedua*, alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan sekolah siaga bencana tidak menjadi fokus anggaran Pendidikan di sekolah. *Ketiga*, sistem koordinasi antara dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan sudin Jakarta barat dan SMAN 96 Jakarta yang belum sebagai satu kesatuan koordinasi yang tidak terpisahkan. *Keempat*, Bangunan SMA Negeri 96 Jakarta yang memiliki konsep menanggulangi bencana nyatanya malah berstruktur yang tidak tahan terhadap guncangan. *Kelima*, kurangnya pembatasan dan perencanaan sekolah sebagai pusat evakuasi sementara. *Keenam*, Pelatihan tanggap bencana masih sangat minim di simulasikan di SMA Negeri 96 Jakarta. *Ketujuh*, Memperkuat kurikulum nasional dan pelatihan guru. Tidak adanya mata Pelajaran yang berfokus pada siaga bencana menjadi indikasi tidak adanya pelatihan siaga bencana di tingkat guru dan siswa. sebaliknya, tugas pengawasan dan pelatihan siaga bencana, diserahkan kepada ekstrakurikuler PMR yang merupakan institusi pengembangan minat dan bakat siswa dalam bidang Kesehatan, bukan Lembaga satgas siaga bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- c. Penegakan konsep Kebijakan *Comprehensive School Safety* di Indonesia perlu dilakukan untuk menyempurnakan implementasi dari konsep sekolah siaga bencana yang sudah di jalankan disekolah-sekolah. Ada beberapa indikator kebijakan *Comprehensive School Safety* sudah dijalankan di sekolah tersebut. *Pertama*, adanya proses pengumpulan data dan menggunakan data mitigasi risiko bencana alam dan dampaknya bagi pengurangan resiko bencana di sekolah. *Kedua*, adanya penentuan fokus program siaga bencana di sekolah dalam bentuk *budgeting* dan kebijakan sekolah siaga bencana yang memiliki porsi besar. *Ketiga*, sekolah tersebut membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi siaga bencana di tingkat dinas pendidikan kota dan provinsi. *Keempat*, sekolah melakukan penilaian atas ketersediaan fasilitas konsep sekolah siaga bencana dan mengganti fasilitas yang tidak berfungsi atau tidak ada sebagai persyaratan sekolah tanggap bencana. *Kelima*, sekolah melakukan pembatasan terkait menjadikan sekolah sebagai pusat evakuasi sementara. *Keenam*,

Melakukan intensifikasi dalam pelatihan tanggap bencana. Pelatihan merupakan komponen utama dalam membangun kompetensi siswa dan guru dalam membangun kesadaran akan tanggap bencana. *Ketujuh*, Memperkuat integrasi kurikulum nasional dengan pelatihan siaga bencana.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian tentang *Comprehensive School Safety*, maka penulis memberikan saran untuk penguatan implementasi kebijakan *sekolah siaga bencana berdasar teori Comprehensive School Safety*. *Pertama*, perlunya penambahan anggaran untuk menjalankan program sekolah siaga bencana di SMA Negeri 96 Jakarta. Penguatan anggaran untuk membiayai pelatihan tanggap bencana dan merenovasi gedung sekolah yang belum memiliki fasilitas siaga bencana dan menjamin keselamatan siswa dan guru. *Kedua*, perlunya dibentuk Lembaga Satgas Tanggap Bencana di sekolah yang khusus melakukan advokasi dan pelatihan kepada siswa dan guru terkait pengetahuan risiko bencana dan tanggap bencana alam di sekolah. *Ketiga*, guru perlu diberikan pelatihan tentang sekolah siaga bencana, sehingga bisa mengajarkan kepada siswa tentang kesadaran risiko bencana dan tanggap bencana. *Keempat*, integrasi konsep dan materi sekolah siaga bencana dalam kurikulum Pendidikan yang di jalankan dalam SMAN 96 Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal Ilmiah

- Al-Nashr, M. S., Integrasi Pendidikan Siaga Bencana Dalam Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, Vol. 6 No. 2 (2018).
- Amri, A., Bird, D. K., Ronan, K., Haynes, K., dan Towers, B. Disaster risk reduction education in Indonesia: challenges and recommendations for scaling up. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, Vol. 17 No. 4 (2017).
- Angraini, L. M., Syamsuddin, S., Wirawan, R., Qomariyah, N., dan Sukrisna, B., Pendampingan Sekolah Siaga Bencana Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Di SMK Kehutanan Qomarul Huda Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol. 1 No. 2 (2019).
- Anisah, Nisfi, dan Sri Sumarni. "Model sekolah aman bencana dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter di MIN 1 Bantul." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* Vol. 10 No. 1 (2019).
- Daud, R., Sari, S. A., Milfayetty, S., dan Dirhamsyah, M., Penerapan Pelatihan Siaga Bencana Dalam Siaga Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Komunitas SMA Negeri 5 Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*, Vol. 1 No. 1 (2014).
- Dewanggajati, Aditya, and Sartika Djamaluddin. "Pengaruh Lembaga Pendidikan dan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Partisipasi Pelatihan Bencana Rumah Tangga." *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)* Vol 5 No. 1 (2020).
- Dewi, A. R., Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana Tingkat Sekolah Dasar Di Yogyakarta [Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat]. Universitas Negeri Semarang, (2019).
- Dwiningrum, S. I. A., Developing School Resilience for Disaster Mitigation: A Confirmatory Factor Analysis. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, Vol. 26 No. 4 (2017).
- Fernandez, G., dan Shaw, R., Youth participation in disaster risk reduction through science clubs in the Philippines. *Disasters*, Vol. 39 No. 2 (2015).
- GADRRRES, & UNISDR. Comprehensive school safety: A global framework in support of the global alliance for disaster risk reduction and resilience in the education sector. Global Alliance for Disaster Risk Reduction in the Education Sector (GADRRRES) and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) (2017b).
- Hayudityas, B. Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik. *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- IFRC & Save the Children. Public awareness and public education for disaster risk reduction: action-oriented key messages for households and schools, edisi kedua, (2018).
- Kasman, R., Bimbingan Satuan Pendidikan Aman Bencana Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Pasca Bencana Di Kota Palu, Sigii Dan Donggala. *Jurnal Obor Penmas*, Vol. 2 No. 1. (2019).
- Paci-Green, Rebekah, et al. "Comprehensive school safety policy: A global baseline survey." *International journal of disaster risk reduction* Vol. 44 (2020).
- , Rebekah, Vigneaux, G., Jensen, S., dan Petal, M. Developing and Implementing Comprehensive School Safety Policy, (2018).

- Qoriandani, M., dan Pambudi, D. I., Implementasi Sekolah Siaga Bencana Pada SD Unggulan Aisyiyah Bantul. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, Vol. 7 No. 2 (2020).
- Rahesli Humsona, Sri Yuliani, dan Sigit Pranawa. Kesiapsiagaan Anak Dalam Menghadapi Bencana: Studi Di Kabupaten Sleman. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (LWSA)*, Vol. 2 No. 1 (2019).
- Shah, A. A., Gong, Z., Pal, I., Sun, R., Ullah, W., & Wani, G. F., Disaster Risk Management Insight on School Emergency Preparedness – a Case Study of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Vol. 51 (2020).
- Utama, R. I., Syah, N., Rifwan, F., Sari, N. M., dan Yandra, M., Penerapan Dan Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana Bagi Anak-Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Agam. *CIVED*, Vol. 5 No. 4 (2018).
- Wihyanti, R., Analisis Inovasi Pendidikan Kebencanaan di Sekolah di Indonesia. *Wijayakusuma Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 1 No. 1 (2020).

B. Media Online

- Angela Siallagan. “Pemprov DKI Renovasi SMAN 96 Jakarta Berkonsep Net Zero”, diakses 27 september 2023.
<https://gadrrres.net/resources/public-awareness-and-public-education-for-disaster-risk-reductionkey-messages>, diakses 27 september 2023
- <https://gerashiaga.files.wordpress.com/2012/06/surat-edaran-mendiknas-no-70a-mpn-se-2010.pdf>, diakses 27 September 2023.
- Kesalahan Konstruksi Diduga Jadi Penyebab Robohnya Bangunan SMAN 96 Jakarta Barat (sindonews.com), diakses 28 september 2023
- Maldives National Disaster Management Centre, Maldives national progress report on the implementation of the Hyogo Framework for Action (2011-2013). *Maldives National Disaster Management Centre* (2012).
 lihat:<https://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/reports/v.php?id=28967&pid:223>, diakses 27 septemeber 2023.
- Muchlisin, Riadi, “Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis Ekstrakurikuler”
<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis-ekstrakurikuler.html>, diakses 27 september 2023
- Pemprov DKI Renovasi SMAN 96 Jakarta Berkonsep Net Zero, Telan Rp 37 Miliar Halaman all - Kompas.com, **diakses 28 september 2023.**
- Sardjunani, N., Advancing Child Rights in the Context of DRR Initiatives in Indonesia, Indonesia Country’s Experiences and Achievements. Presented at the Ministry of Natural Development Planning. Ministry of Natural Development Planning (2010).
 lihat:https://www.unicef.org/eapro/Child_Right_DRR_Indonesia-2010.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us, diakses 27 september 2023
- Sjukri. “Kesalahan Konstruksi Diduga Jadi Penyebab Robohnya Bangunan”, dakses 27 september 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No.70a/MPN/SE/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Biodata Penulis



RIAN ARIF PRATAMA,

lahir pada 17 Desember 2006 di Oku Timur, Sumatera Selatan.

Penulis Telah menempuh pendidikan:

SD Negeri 09Cengkareng Timur (2012 - 2019),

SMP Negeri 45 Jakarta (2019 – 2022),

SMA Negeri 96 Jakarta (2022 – 2025), kini sedang melanjutkan belajarnya.

Bidang Mata Pelajaran yang diminati penulis adalah Kimia Dengan catatan partisipan OSN-K Kimia 2023, Rencana Studi Lanjutan UNIVERSITAS GADJAH MADA Fakultas (Tekhnik Nuklir). Penulis memiliki minat terhadap pembahasan ilmiah dan kajian akademis.

LAMPIRAN 2

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

Nama : RIAN ARIF PRATAMA

NISN : 0065456540

Alamat: Jl. Rusun BCI Blok Melati 8/3/8

Adalah PIHAK 1 Selaku pencipta, dengan ini menyatakan pernyataan penyerahan kepada

Nama :

NIK :

Alamat:

Adalah PIHAK 2 selaku penerima hak cipta berupa karya ilmiah untuk didapatkan dalam bentuk lisensi pada Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

Demikianlah Surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK 2

PIHAK 1

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 3

Pernyataan Orisinalitas Karya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rian Arif Pratama
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 17 Desember 2006
Alamat Lengkap : Rusun BCI Blok Melati 8/3/8, Cengkareng Timur
No. Hp : 081906846484
Judul Karya : *KEBIJAKAN COMPREHENSIVE SCHOOL SAFETY
SEBAGAI SOLUSI MEREDUKSI KORBAN
BENCANA ALAM DI SMA NEGERI 96 JAKARTA*

Jenis Lomba yang Diikuti : Karya Ilmiah

Dengan ini menyatakan bahwa tulisan/naskah/karya yang saya sertakan dalam lomba Festival kesiapsiagaan bencana adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan karya orang lain dan belum pernah diikutsertakan dalam segala bentuk perlombaan serta belum pernah dimuat di media manapun. Apabila di kemudian hari ternyata tulisan/naskah/karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka secara otomatis tulisan/naskah/karya saya dianggap gugur. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 September 2023

Yang menyatakan

(Rian Arif Pratama)